

Wujud Aparatus Ideologi Negara dan Aparatus Represif Negara dalam Novel *Babad Kopi Parahyangan* Karya Evi Sri Rezeki

Muhsin Sabilillah¹, Redyanto Noor², Khothibul Umam³
^{1,2,3}Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
muhsin.sabilillah1212@gmail.com

Abstract

The goal of this research is to identify the form of the Ideological State Apparatuses and the Repressive State Apparatuses that emerge in the novel Babad Kopi Parahyangan by Evi Sri Rezeki which was published in 2020. This sociology of literature research is conducted with qualitative data through the literature review method. The author employs Louis Althusser's concepts of Ideological State Apparatuses and Repressive State Apparatuses in his essay entitled Ideology and Ideological State Apparatuses (2014) to analyze the forms of Ideological State Apparatuses and Repressive State Apparatuses. The results of this study describes that: (1) the Ideological State Apparatuses identified in this study have aesthetic and narrative effects in the form of the actions and thoughts of the characters in the novel Babad Kopi Parahyangan; and (2) the Repressive State Apparatuses identified in this study also have aesthetic and narrative effect, namely to produce coercive control to figures who are against the state agendas as told in the novel Babad Kopi Parahyangan by Evi Sri Rezeki.

Keywords: Ideology, Ideological State Apparatuses, Repressive State Apparatuses, Sociological literature, Babad Kopi Parahyangan.

Intisari

Wujud Aparatus Ideologi Negara dan Aparatus Represif Negara yang hadir dalam novel *Babad Kopi Parahyangan* karya Evi Sri Rezeki yang terbit pada tahun 2020 berusaha diidentifikasi melalui penelitian ini. Penelitian sosiologi sastra ini dikaji dengan data-data kualitatif melalui metode studi pustaka. Penulis menggunakan konsep Louis Althusser tentang Aparatus Ideologi Negara dan Aparatus Represif Negara dalam esainya *Ideology and Ideological State Apparatuses* (2014) untuk menganalisis wujud Aparatus Ideologi Negara dan Aparatus Represif Negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Aparatus Ideologi Negara yang teridentifikasi dalam penelitian ini memiliki efek estetis dan naratif yakni memengaruhi tindakan dan pikiran tokoh-tokoh juga menjadi latar dalam novel *Babad Kopi Parahyangan*; dan (2) Aparatus Represif Negara yang teridentifikasi dalam penelitian ini memberikan kontrol koersif pada tokoh-tokoh yang kontra terhadap agenda-agenda negara yang diceritakan novel *Babad Kopi Parahyangan* karya Evi Sri Rezeki.

Kata Kunci: Ideologi, Aparatus Ideologi Negara, Aparatus Represif Negara, Sosiologi Sastra, *Babad Kopi Parahyangan*.

Pendahuluan

Marx dan Engles menganggap negara sebagai alat. Ia adalah kekuasaan terorganisasi dari suatu kelas untuk menindas kelas yang lain. Kelas yang mengeksploitasi dan menindas tentunya perlu

kekuasaan politik untuk mempertahankan kepentingan kelompoknya, sekaligus mencegah kepentingan kelompok lain. Negara adalah komite yang mengelola kepentingan kaum borjuis secara menyeluruh (Marx & Engels, 2009:4-29). Definisi ini secara eksplisit mengartikan negara sebagai aparatus represif. Negara adalah sebuah mesin represi yang membuat kelas berkuasa bisa memastikan dominasi mereka atas kelas pekerja sehingga membuat yang pertama bisa menundukkan yang belakangan dalam proses pemerasan nilai lebih, eksploitasi kapitalis (Althusser, 2014:70). Negara adalah Aparatus Negara. Ia tidak memiliki makna apa apa kecuali sebagai fungsinya dari kekuasaan negara. Untuk mempertahankan kekuasaannya, negara membutuhkan Aparatus Negara yang dibagi atas Aparatus Represif Negara dan Aparatus Ideologi Negara (Althusser, 2014:73-75).

Aparatus Represif Negara (*Repressive State Apparatuses*) adalah bentuk aparatus negara yang paling kasat mata. Ia adalah seluruh mekanisme koersif yang bekerja dalam memastikan tereproduksinya syarat-syarat produksi. Bentuknya adalah pemerintah, pengadilan, penjara, angkatan bersenjata, sipir, polisi (Althusser, 2014:70-75). Aparatus Ideologi Negara (*Ideological State Apparatuses*) bekerja dalam mekanisme persuasif-ideologis yang berfungsi menjamin reproduksi syarat-syarat produksi. Aparatus ini membuat kondisi riil yang sedang terjadi terkesan natural dan kodrati. Ia bekerja melalui institusi-institusi yaitu: agama, pendidikan, keluarga, hukum, politik, serikat-buruh, komunikasi, dan budaya (Althusser, 2014:74-75). Perbedaan mendasarnya adalah Aparatus Represif Negara secara masif dan dominan bekerja melalui kekerasan, dan bekerja melalui ideologi secara sekunder sedangkan Aparatus Ideologi Negara terutama bekerja melalui ideologi, dan melalui kekerasan secara sekunder.

Sastra merupakan sebuah cerminan zaman. Ia adalah refleksi langsung dari berbagai aspek struktur sosial, hubungan keluarga, konflik kelas, dan komposisi masyarakat. Sebuah karya bergantung pada situasi sosial dan patronase penulis. Karya sastra menangkap dan merespon suatu kondisi historis yang spesifik. Ia menyetujui, menantang, mengkritik, atau membatalkan sama sekali sebuah fenomena sosial yang dihadapinya (Swingewood, 1972:11-23). Sehingga, dalam karya sastra kita bisa melihat wujud Aparatus Ideologi Negara dan Aparatus Represif Negara yang tampak dalam teks tersebut.

Salah satu karya sastra yang berusaha merespon suatu peristiwa historis yang spesifik adalah novel *Babad Kopi Parahyangan* karya Evi Sri Rezeki. Novel ini bertutur soal perkebunan kopi di Parahyangan pada masa Tanam Paksa. Novel ini menggali bagaimana kopi yang ditanam di Jawa bisa menembus pasar dunia. Ia menuturkan kebijakan, pelanggaran kemanusiaan, keserakahan, dan penderitaan pada masa itu.

Karim, tokoh sentral dalam cerita ini, semakin bulat keinginannya untuk menjadi bandar kopi terkenal sejak bertemu dengan Si Pelaut dan cintanya ditolak Uni Fatimah. Ia memutuskan pergi ke Parahyangan setelah mendapatkan informasi tempat tersebut merupakan sarang mutiara hitam, kopi. Ia berharap, setelah sampai ke tanah Jawa, ia bakal segera menjadi bandar kopi yang terkenal dan kaya raya. Setelah sampai, ia temukan sebaliknya. Di Parahyangan pada masa Tanam Paksa itu, ia menemukan penderitaan, penyalahgunaan kekuasaan, keserakahan, kelaparan, kemiskinan, eksploitasi kemanusiaan, dan kesejahteraan sosial berlebihan. Kopi dari tanah Parahyangan yang disebut bercita rasa asam, manis, pahit tersebut ternyata hanya bisa dirasakan oleh elit-elit penguasa. Petani-petani di tanah Parahyangan berkerja tanpa upah. Lahan-lahan sawah milik mereka dipaksa berubah menjadi kebun kopi.

Perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan perkebunan yang muncul pada masa VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*), dan terutama ketika VOC bubar dan digantikan oleh Kolonialisasi Belanda. Keberadaan perkebunan sangat penting bagi kelangsungan ekonomi kolonial, terutama perkebunan kopi. Pada periode Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*), komoditas kopi merupakan salah satu komoditas primadona dalam perdagangan internasional. Seluruh wilayah Hindia Belanda yang memiliki geografi pegunungan aktif menjadi wilayah perkebunan kopi (Goor, 1986:35).

Jan Breman dalam *Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa, 1720-1870* mengatakan budidaya kopi di Jawa untuk keperluan pemasaran di pasaran dunia sudah dimulai sejak awal abad ke-18. Pada waktu itu, Perusahaan Dagang Belanda di Hindia Timur (*Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC*) menjelajah mencari barang-barang kolonial di berbagai bagian kepulauan Nusantara. Para pedagang VOC itu mendorong budidaya tanaman asing ini. Pada mulanya mereka memborong hasil panen masyarakat petani, tetapi apa

yang awalnya bersifat sebagai transaksi komersial segera berubah menjadi penyetoran kopi secara paksa dengan harga yang jauh di bawah harga pasar.

Tingginya permintaan dunia terhadap kopi mengakibatkan tuntutan terhadap biji kopi semakin membengkak jumlahnya. Prasyarat untuk memenuhi permintaan itu adalah dengan meluaskan kekuasaan VOC sampai jauh di pedalaman. Pemungutan pajak secara tidak langsung yang dilaksanakan dengan memakai para bupati dan kepala rendahan dari kalangan bangsawan Sunda, menurunkan biaya pengelolaan. Pada waktu itu tenaga kerja masih merupakan hal yang langka sehingga VOC, dan kemudian juga pemerintah kolonial awal, mencoba menguasai dengan cara membatasi ruang gerak para petani.

Pada tahun 1830-an, Belanda meluncurkan program tanam paksa kopi di Jawa Barat. Program tersebut dilakukan dengan memaksa petani-petani lokal untuk menanam kopi di lahan-lahan yang telah ditentukan oleh pemerintah kolonial. Dalam sistem tanam paksa kopi, para petani juga diperlakukan secara tidak manusiawi oleh para pemilik perkebunan. Mereka dipaksa untuk bekerja selama berjam-jam tanpa ada jaminan upah yang layak. Banyak petani yang mengalami penyakit dan kelelahan akibat bekerja terus menerus di perkebunan kopi, tetapi mereka tidak diizinkan untuk beristirahat atau mendapatkan perawatan medis yang layak.

Evi dalam novelnya berusaha menceritakan detail-detail yang muncul dalam fenomena sejarah spesifik ini. Dengan penulisan sastra bernuansa realis ini, ia menggali kekejaman pemerintah kolonial melalui aparatus ideologi dan aparatus represifnya. Oleh sebab itu, maka peneliti tertarik untuk meneliti novel tersebut menggunakan pendekatan sosiologi sastra dengan judul *Wujud Aparatus Ideologi Negara dan Aparatus Represif Negara dalam Novel Babad Kopi Parahyangan Karya Evi Sri Rezeki*, dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana wujud Aparatus Ideologi Negara dalam novel *Babad Kopi Parahyangan* karya Evi Sri Rezeki? dan; bagaimana wujud Aparatus Represif Negara pada novel *Babad Kopi Parahyangan* karya Evi Sri Rezeki? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan wujud Aparatus Ideologi Negara dalam novel *Babad Kopi Parahyangan* karya Evi Sri Rezeki dan menjelaskan wujud Aparatus Represif Negara dalam novel *Babad Kopi Parahyangan* karya Evi Sri Rezeki. Manfaat teoretis dari hasil penelitian adalah untuk menambah wawasan dan khazanah penelitian ilmu sastra Indonesia, khususnya mengenai implementasi teori Ideologi Louis Althusser dalam kajian sastra Indonesia.

Sedangkan, manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah untuk dapat dijadikannya penelitian ini sebagai rujukan untuk penelitian lain sejenis nantinya di masa depan.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah novel *Babad Kopi Parahyangan* karya Evi Sri Rezeki yang diterbitkan Marjin Kiri tahun 2020 sebagai objek material. Sumber sekunder ialah buku, artikel, esai, atau terbitan lain yang menunjang pembahasan pada penelitian ini. Objek formal pada penelitian ini adalah analisis Aparatus Ideologi Negara dan Aparatus Represif Negara melalui teks dan/atau wacana dengan perspektif Louis Althusser pada novel *Babad Kopi Parahyangan* karya Evi Sri Rezeki.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan literatur. Penulis melakukan teknik simak-catat dalam menelusuri kepustakaan yang mengandung informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Langkah-langkah pengumpulan data adalah: pembacaan kritis dan berulang dengan cermat dan teliti terhadap objek material; pencarian dan pembacaan referensi atau literatur pendukung yang berkaitan dengan objek material maupun objek formal; pendataan dan inventarisasi terhadap data dari objek material yang menggambarkan atau mewakili poin-poin dari rumusan masalah.

Data-data yang didapatkan kemudian diolah melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Data-data yang berhasil dikumpulkan dianalisis menggunakan teori utama dan pendukung yakni teori Aparatus Ideologi Negara dan Aparatus Represif Negara yang dipaparkan Louis Althusser. Teknik analisis ini digunakan agar penulis mendapatkan data yang bisa disajikan. Data yang telah dikumpulkan dan dianalisis kemudian disajikan dengan metode deskriptif-analitis. Metode ini mendeskripsikan data yang didapatkan dengan disertakan analisis dari peneliti.

Hasil dan Pembahasan

Aparatus Ideologi Negara dan Aparatus Represif Negara adalah sebuah instrumen negara yang berusaha memastikan tereproduksinya syarat-syarat produksi. Syarat-syarat produksi yang dimaksud adalah yang dijelaskan oleh Karl Marx dalam *Capital II* yakni: kekuatan-kekuatan

produksi (*the productive forces*) dan relasi produksi yang berlaku (*the existing relations of production*). Agar dapat terus memproduksi suatu komoditas, kapitalis mesti memastikan tereproduksi syarat-syarat produksi tersebut. Salah satu kekuatan produksi yakni tenaga-kerja (*labour-power*) (Althusser, 2014: 50-52).

Perbedaan keduanya adalah, Aparatus Ideologi Negara terutama dan secara masif berfungsi dengan ideologi, tetapi mereka juga memiliki fungsi Represif sebagai fungsi sekundernya, bahkan apabila pada akhirnya, dan hanya pada akhirnya, hal ini sangat lemah dan tersembunyi, bahkan simbolik (tidak ada aparatus yang murni ideologis). Sedangkan sebaliknya, Aparatus Represif Negara terutama dan secara masif berfungsi dengan represi (termasuk represi fisik), sementara fungsi ideologisnya hanya bersifat sekunder (tidak ada aparatus yang murni represif). Kedua hal ini muncul dalam novel *Babad Kopi Parahyangan* karya Evi Sri Rezeki. Hal tersebut akan dibahas di bawah.

Aparatus Ideologi Negara

Althusser menawarkan beberapa institusi tempat Aparatus Ideologi Negara bekerja, yakni: AIN agama (masjid, gereja, wihara, pura, dst.), AIN pendidikan, AIN keluarga, AIN hukum (kategori ini masuk baik dalam AIN maupun ARN), AIN politik (sistem politik, juga partai-partai), AIN serikat buruh AIN komunikasi (pers, radio, televisi, dst.), AIN budaya (sastra, seni, olah raga, dst.). Perlu diketahui bahwa meskipun pada penjabaran di bawah tidak disebutkan secara langsung institusi-institusi Aparatus Ideologi Negara di atas, tapi produk-produknya bisa dirasakan. Penulis meyakini tiap-tiap produk yang berfungsi untuk mereproduksi syarat-syarat produksi dapat dilacak institusi mana yang menggerakkannya. Selain itu, tentunya ideologi tentunya hadir dalam tiap embusan nafas kehidupan masyarakat. Tiap segmen kehidupan masyarakat, tentunya akan ada lebih dari satu institusi ideologi yang hadir di sana. Tentunya memerlukan penjabaran yang komprehensif dan panjang untuk melacak keseluruhannya. Maka oleh sebab itu, penulis di sini hanya akan menjelaskan Aparatus Ideologi Negara mana yang paling menonjol dari data-data yang dipaparkan.

Wujud Aparatus Ideologi Negara berwujud komunikasi terlihat pada bagian kedua dan ketiga novel ini. Aparatus Ideologi Negara berwujud komunikasi berfungsi untuk menyebarkan informasi yang sesuai dengan kehendak dan tujuan negara.

“Kau katakan ini berita rahasia? Ceritaku ini sengaja disebar demi citra kekuasaan Kompeni! Selama hidupku, begitu banyak tafsiran yang telah kudengar. Kau tahu, Nak, sejarah selalu milik pemenang. Di tanah kita, Kompeni jawaranya. Dan aku ini, abdi dalam Kopmeni sepanjang hidupku. Bertaruhlah denganku, kau beserta keturunanmu akan menyebarkan berita serupa!” (Rezeki, 2020: 41).

Meskipun Althusser menyebutkan bentuk institusi AIN komunikasi adalah pers, radio, dan televisi, kita mesti memahami konteks objek material penelitian ini. Novel *Babad Kopi Parahyangan* ini berlatar tahun 1869 sampai tahun 1876. Pada saat itu, radio, televisi, belum lazim digunakan. Bahkan, banyak orang yang buta aksara, sehingga koran pun hanya dibaca sebagian kalangan saja. Komunikasi yang paling lazim pada konteks ini adalah mulut ke mulut. Kutipan di atas disebut merupakan produk Aparatus Ideologi Negara sebab ia membesarkan citra Kompeni. Kompeni perlu membesarkan citranya sebagai penguasa untuk menghadirkan rasa kagum, takut, hormat, serta inferioritas jajahannya. Masyarakat dibuat berpikir bahwa Kompeni-lah yang telah menaikkan derajat hidup mereka. Sehingga, masyarakat jajahan rela tunduk kepada Kompeni. Kesadaran dan revolusi proletariat pun tidak akan terjadi.

Fenomena ini dijelaskan Edward Said sebagai orientalisme. Orientalisme adalah suatu cara memahami dunia Timur melalui kacamata Barat. Dalam bukunya *Orientalisme* (1978) Said menjelaskan bahwa Eropa menciptakan bahwa Timur adalah irasional agar bisa menyebut diri mereka rasional; Timur adalah biadab, sensual, dan malas, sedangkan Barat adalah peradaban itu sendiri dengan nafsu seksual yang terkendali dan etika kerja keras; Timur adalah statis, sedangkan Eropa berkembang dan maju. Ia adalah gaya Barat untuk mendominasi, merstrukturisasi, dan memiliki otoritas atas Timur (Said, 1978: 1-3). Aparatus Ideologi Negara selanjutnya nampak pada bagian delapan buku ini. Aparatus ini berwujud hukum:

Atas nama keadilan, Kompeni memberlakukan peraturan somahan hampir tiga puluh tahun lalu. Yang semula pemungutan upeti ditunjukkan pada pemilik tanah, disahihkan ke setiap lapisan. Kepala cacah mulanya bisa mulanya bisa mengirim petani penyakap atau bujang sebagai ganti dirinya kerja paksa, hal tersebut tak dapat lagi karena para petani penyakap maupun bujang dituntut upeti (Rezeki, 2020: 147).

Peraturan ini lahir karena tidak puasnya Kompeni pada hasil panen yang diharapkan. Hal ini terjadi sebab dengan dibukanya lahan-lahan baru, maka dibutuhkan tenaga kerja untuk perawatan, panen dan pengangkutan kopi. Untuk mengatasi hal ini, maka Kompeni pada tahun 1839 mengeluarkan peraturan untuk tidak membebaskan pekerjaan kepada cacah saja, tetapi pada

keluarga (somahan) mereka, yaitu suami, istri, dan anak-anak yang tinggal di lingkungan tersebut (Breman, 2014:229-230).

Upeti pada masa ini diposisikan sebagai usaha meningkatkan jumlah tanaman wajib VOC. Hal itu dilakukan melalui kewajiban kerja pada penanam, yang bukan hanya melibatkan petani yang menetap (bumi) di suatu daerah, tetapi juga pendatang baru yang ikut tinggal (numpang). Petani numpang adalah petani yang lari dari tempat lain untuk melepaskan diri dari tingginya tuntutan majikannya (De Haan, 1910:362-363 melalui Breman, 2014:81). Produk AIN hukum ini mewajibkan setiap warga negara kelas terendah membayar upeti, kalau tak sanggup, maka mesti bekerja pada Kompeni tanpa upah. Dengan hal ini, kelas penguasa dapat memastikan hadirnya syarat-syarat produksi.

Wujud Aparatus Ideologi Negara kemudian terlihat pada bagian ke sebelas novel *Babad Kopi Parahyangan*:

Atas jasa-jasanya mengembangkan wilayah dan memberdayakan masyarakat, Adang mendapat gelar kehormatan dari bupati dan Kompeni: Asep. Karibnya yang sesama kepala cacah mendapat gelar Ujang dan Agus. Masuklah ia dalam jajaran kepala pribumi kelas kedua yang disebut kompeni sebagai sentana atau landjonkers. Sekaligus menandai bahwa ia berasal dari keturunan baik-baik (Rezeki, 2020: 189).

Pada masa itu, kepala pribumi terbagi dalam dua kelas sosial. Pertama adalah *menak*, yakni sebutan umum bagi bangsawan tinggi, termasuk bupati dan kepala-kepala utama seperti wakilnya, jaksa-kepala, pemuka agama, dan kepala distrik. Kelas kedua adalah *sentana*, yang dalam laporan kolonial disebut *landjonkers* (bangsawan rendah). Mereka berasal dari kalangan petani dan sebagai pemuka masih dekat keterikatannya. Untuk menandai asalnya dari keturunan baik, mereka memakai gelar Asep, Ujang, atau Agus (Breman, 2014:43).

Atas penjelasan di atas, pemberian gelar dapat dikategorikan sebagai produk Aparatus Ideologi Negara kebudayaan. Gelar Asep diberikan kepada Adang terutama adalah untuk ‘menundukkannya’. Dengan gelar tersebut, Adang menjadi bagian dari kelas penguasa itu sendiri. Sebab, Adang bakal merasa terhormat dan makin menghormati Kompeni. Mungkin akan muncul pikiran pengorbanan dirinya untuk pengabdian. Karena dampak yang muncul setelah pemberian gelar tersebut, Kompeni bisa menggunakan sumber daya-sumber daya yang dimiliki oleh Adang atau Asep. Sehingga, kelas penguasa bisa memastikan tereproduksinya syarat-syarat produksi itu.

Frasa ‘keturunan baik-baik’ tentunya ambigu. Menjadi petani tipar dan tidak memiliki hubungan dengan priyayi bukan berarti tidak baik. Hal ini bisa saja merupakan akal-akalan untuk memecah belah kekuatan petani. Terberi gelar bisa merasa bahwa dirinya lebih unggul dibandingkan petani lain. Sehingga, ia merasa membentuk serikat dan mengorganisir perlawanan adalah hal yang tidak diperlukan. Revolusi proletariat pun kandas.

Novel ini juga menampilkan produk Aparatus Ideologi Negara institusi keluarga dan, terutama, pendidikan:

Sejak kecil Raden Arya Kusumah Jaya mendapat ajarab bahwa para petani adalah orang-orang malas yang mesti dipaksa bahkan demi kesejahteraannya sendiri yang dininabobokan oleh kemurahan alam raya. Pada masa-masa itu, ia ikut mencibir sebagaimana Kompeni memandang rendah mereka. Ia tak menyadari sebetulnya siapa yang malas dan siapa yang diperas (Rezeki, 2020: 241).

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Kompeni perlu membuat citranya sebagai penguasa. Hal ini guna mendorong reproduksi syarat-syarat produksi. Kelas dominan menggunakan institusi pendidikan untuk memperkuat ideologi dan pemahaman itu. Pendidikan berfungsi secara tidak langsung dan secara hampir langsung dalam mereproduksi syarat-syarat produksi. Pada cara hampir langsung, perlu dipahami bahwa dalam corak produksi kapitalis, produksi mensyaratkan dua hal atau *means of production*: kekuatan produksi dan relasi sosial produksi. Kekuatan produksi ini kembali dibagi menjadi dua, alat-alat produksi dan tenaga-kerja, sebagaimana dibahas dalam Capital jilid 2. Sedangkan relasi sosial produksi relasi kepemilikan faktor produksi yang terdiri dari kerangka insitusalional melalui mana kelas mengeksploitasi dan mengambil produk surplus (Dumenil & Foley, 2015:11). Oleh karena itu, untuk dapat terus memproduksi, setiap formasi sosial harus mereproduksi faktor produksinya pada saat ia memproduksi, dan tidak mungkin ada produksi berjalan tanpa adanya reproduksi pada alat-alat produksi. Di sekolah, para calon pekerja ini mempelajari membaca, menulis, serta pengetahuan lain yang memiliki manfaat langsung dalam beragam pekerjaan dalam produksi kapitalis. Mereka belajar pengetahuan-tentang-bagaimana (*know-how*) yang bersifat teknis sehingga mereka siap dieksploitasi secara ekonomi. Kelas penguasa juga mereproduksi ketundukannya pada ideologi yang berkuasa serta praktik dari ideologi tersebut (Althusser, 2014: 49-52).

Fungsi ideologi dalam pendidikan dielaborasi lebih lanjut oleh suksesor Althusser, yakni Pierre Bourdieu. Menurut Bourdieu, institusi pendidikan merupakan tempat utama pemaksaan ‘halus’

ideologi terjadi. Institusi pendidikan berfungsi untuk melestarikan, menanamkan, dan mereproduksi nilai-nilai kebenaran yang dimonopoli oleh kelas dominan. Ia berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mempertahankan *status quo* (Bourdieu & Passeron, 1990:198).

Selain itu, tampak juga Aparatus Ideologi Negara politik. Hal ini muncul pada surat yang dikirim Philip Vitalis kepada Raden Arya Kusumah Jaya yang menceritakan soal bakal diterapkannya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Keduanya berpikir bahwa dua peraturan tersebut bakal mengurangi penindasan yang dialami oleh rakyat jajahan.

Kabarnya baik bagiku juga bagimu. Sebentar lagi parlemen Belanda akan mengesahkan Undang-undang Agraria dan Undang-undang Gula. Aturan baru yang negerimu nanti-nantikan.

... Mereka akan boleh menanam tanaman pangan bahkan tanaman apa pun sesuai kehendak hati mereka meski kopi tetap diolah juga (Rezeki, 2020: 242).

Aparatus Ideologi Negara politik adalah aparatus ideologi yang *tricky*. Sebab, ia merupakan wujud yang asosiatif atau mudah bergaul. Undang-undang yang diceritakan di atas bukanlah dimenangkan atau direbut oleh kelas oposisi dari kelas berkuasa. Tetapi, kelas berkuasa secara baik hati memberikan hal tersebut. Kebaikan hati tersebut terutama berfungsi untuk meredam revolusi proletariat. Kelas penguasa tentunya tak akan pernah bersedia untuk direbut dan dihancurkan. Ia dengan sengaja berbaik hati untuk memberikan ilusi kemenangan bagi kelas oposisi, padahal mereka sama sekali tidak menang. Toh, kelas penguasa masih menguasai banyak bentuk Aparatus Ideologi yang lain. Mereka juga punya Aparatus Represif Negara yang bersenjata lengkap dan siap digunakan ketika dibutuhkan (Althusser, 2014: 107-113).

Aparatus Represif Negara

Aparatus Represif Negara (*Repressive State Apparatuses*) adalah bentuk aparatus negara yang paling kasat mata. Ia adalah seluruh mekanisme koersif yang bekerja dalam memastikan tereproduksinya syarat-syarat produksi. Bentuknya adalah pemerintah, pengadilan, penjara, angkatan bersenjata, sipir, polisi (Althusser, 2014:75). Aparatus (Represif) Negara, terutama dan secara masif berfungsi dengan represi (termasuk represi fisik), sementara fungsi ideologisnya hanya bersifat sekunder (tidak ada aparatus yang murni represif) (Althusser, 2014:77-79). Pada

romannya yang beraroma realis ini, Evi Sri Rezeki menggambarkan konteks pemerintahan yang eksis di semesta *Babad Kopi Parahyangan*.

“Inilah masa kalian hidup, Nak,” kata si Pelaut serak dramatis. Adalah Johannes Van den Bosch memberi usulan pada pemerintah untuk meningkatkan hasil bumi di negeri jajahan. Gagasannya berhasil mencuatkan jabatannya menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda (Rezeki, 2020: 56).

Kutipan di atas membeberkan informasi kepada pembaca bahwa novel ini berlatar pada masa pemerintahan Van den Bosch sebagai Gubernur Jenderal Hindia-Belanda sebab gagasannya menerapkan *Cuultur-stelsel*. Pemberian tugas ini didorong oleh parahnya kas Belanda. Hal ini disebabkan utang-utang yang menumpuk (Poesponegoro & Notosusanto, 2019:352). Struktur atau birokrasi pemerintahan juga nampak pada novel ini. Misalnya kutipan di bawah:

Meneer Kontrolir Kopi mengentak-entak tongkatnya ke tanah mengatasi dengungan dengan sia-sia. Sebuah pecutan menggetarkan udara dari tangan Mandor Satria membungkam mulut para pekerja. Gemetar tubuh dan aura ketakutan mereka mengimpit dada Karim... Mandor Satria mempersilahkan Meneer Kontrolir Kopi berbicara (Rezeki, 2020:148-149).

Kutipan di atas menjelaskan bahwa Mandor Satria sebagai penanggung jawab langsung perkebunan secara birokrasi berada di bawah Tuan Kontrolir Kopi. Mandor Satria secara struktur juga berada di bawah Raden Arya Kusumah Jaya yang bertindak sebagai patih atau bupati. Seperti dibuktikan pada kutipan di bawah:

Mandor Satria menyeringai saat ia lihat sosok Raden Arya Kusumah Jaya mengenakan pakaian kebesaran. Dipayungi jongos, Raden Arya melangkah mantap. Dengan sikap terhormat berlebih-lebihan Mandor Satria bersimpuh...

“Juragan...” ucap Mandor Satria yang disambut kibasan tangan Raden Arya Kusumah Jaya (Rezeki, 2020:156).

Meski Raden Arya dan Tuan Kontrolir kopi sama-sama berada di atas Mandor Satria, itu bukan berarti mereka setara. Pada semesta roman ini, Raden Arya nampaknya digambarkan berada di bawah Tuan Kontrolir Kopi sebagai penguasa dari Kompeni. Terlihat pada kutipan di bawah:

Matanya terpaku pada surat yang amplopnya belum disobek di atas koran Java-Bode. Tanpa membacanya pun, Raden Arya dapat meramalkan isinya. Teguran dari Tuan Kontrolir. Teguran karena sepekan lalu lima petani kedatangan kabur dari perkebunan yang diawasinya. Sebagai patih seharusnya ia mampu mencegah kejadian demikian (Rezeki, 2020:236).

Meskipun ingin, Raden Arya tak bisa menggoyangkan posisi Mandor Satria. Sebab Mandor Satria ditunjuk langsung oleh Tuan Kontrolir Kopi. Struktur administrasi *cultuur-stelsel* menghadirkan hubungan langsung dengan para petani, dan desa menjadi unit dasar pemerintah. Kepala desa adalah mata rantai antara petani dan pejabat-pejabat bangsa Indonesia yang lebih tinggi tingkatannya. Bupati bertanggung jawab kepada pemerintahan bangsa Eropa. Namun para pejabat Eropa juga terlibat pada tingkatan-tingkatan yang lebih rendah (Ricklefs, 2007:262).



Bagan unit administrasi dan kedudukan pejabat-pejabat lokal (Tjondronegoro & Gunawan, 1984 dalam Anggraini, 2006:47).

Pada bagan ini, baik pejabat Belanda maupun Pribumi secara formal berjalan sejajar. Birokrat-birokrat di kedua sistem ini berelasi layaknya kakak-adik. Pejabat Belanda mengurus segala kepentingan kolonial, sedangkan pejabat pribumi bertugas di bawah arahan para tuan tanah maupun penguasa lokal di wilayahnya. Dengan struktur ini, kehadiran para pejabat berkebangsaan Eropa di tingkat desa menunjukkan kepada rakyat Jawa biasa bahwa hidup mereka dikendalikan oleh pemerintah kolonial (Ricklefs, 2007:262).

Struktur pemerintahan ini hadir sebagai Aparatus Represif Negara untuk memastikan terpenuhinya syarat-syarat produksi. M.C. Ricklefs bilang bahwa dari seluruh Jawa, hanya perkebunan-perkebunan kopi di Jawa Barat yang selalu menghasilkan keuntungan (2007:259). Karena itu, pemerintah berusaha memastikan bahwa penumpukan keuntungan bisa terus mengalir lewat birokrasi yang dibuatnya ini. Pemerintahan secara natural adalah Aparatus Represif Negara.

Sebab secara otomatis ia mengontrol aparatus koersif seperti polisi, pasukan khusus, penjara, pengadilan, atau pun tiang gantung untuk mengontrol individu (Althusser, 2014:136). Pada konteks ini, pemerintahan kolonial menggunakan Pasukan Jayengsekar dan polisi perkebunan sebagai aparatus koersif.

Orang-orang mulai berbisik-bisik dengan wajah ketakutan: Pasukan Jayengsekar!
Itulah pertama kalinya Karim melihat sendiri pasukan paling ditakuti di Pulau
Jawa.

Kutipan pertama adalah adegan pertama yang memperkenalkan Pasukan Jayengsekar kepada pembaca. Novel ini bahkan menjelaskan apa itu Pasukan Jayengsekar. Terlihat pula ketakutan masyarakat pada pasukan elit itu.

Pasukan Jayengsekar dibentuk oleh Daendels pada tahun 1808. Prajurit-prajuritnya berasal dari anak-anak pejabat keraton yang cukup berada dan digembleng oleh pelatih-pelatih Eropa. Tugas-tugas pasukan ini umumnya terbatas pada patroli malam hari di kota-kota yang berada langsung di bawah pemerintah jajahan, seperti mengawal narapidana dan barisan pengantar uang serta mendampingi para pejabat ketika mereka melakukan perjalanan dinas (Carey, 2008:53). Selain Pasukan Jayengsekar, novel ini juga menghadirkan polisi perkebunan sebagai instrumen pengawasan. Misalnya pada kutipan di bawah:

Polisi-polisi kebun mencengkram tangan ketiga lelaki pribumi. Mereka meronta-ronta mencoba melawan sebisanya. Dengan posisi berlutut satu per satu menerima pukulan rotan di punggung Mandor Satria. Suara pecutan menggesek kulit menembus hingga tulang menyakak bulu kuduk (Rezeki, 2020:151).

Pada kutipan di atas, polisi kebun membantu Mandor Satria mencambuki petani-petani yang berusaha kabur. Petani-petani ini sebelumnya ditangkap oleh Pasukan Jayengsekar. Terlihat salah satu tugas polisi kebun adalah melakukan tindakan represif-koersif. Kepolisian pada masa ini bersifat dualistik. Pada satu sisi, kepolisian berada di bawah komando Departemen Dalam Negeri (*Binnenlands Bestuur*) Kompeni, di sisi lain kepolisian dikomandoi oleh hierarki administratif pribumi, pangreh praja (Bloembergen & Klinkers, 2014:1204). Kepolisian kemudian dibagi untuk melaksanakan tugas yang spesifik. Ada polisi perkotaan (*stadpolitie*), polisi pedesaan (*desapolitie*), polisi penjaga (*politieoppasser*), polisi perkebunan (*cultuurpolitie*), juga polisi pangreh praja (*bestuurpolitie*).

Polisi perkebunan bertugas untuk menjaga keamanan dan melaksanakan perintah perusahaan perkebunan yang sebagian besar dimiliki oleh Kompeni. Mereka memelihara ketertiban, melakukan pengawasan terhadap buruh, dan memberikan sanksi kepada pelanggar aturan. Ketika konflik timbul, mereka mesti meredamnya. Peran kepolisian (*politierol*) berurusan dengan kejahatan dan pelanggaran kecil. Pelanggaran dan kejahatan kecil ini berhubungan dengan peraturan-peraturan perburuhan, berupa kontrak, kelakuan buruh, dan kerja rodi (Rossum, 2018:70-73).

Novel *Babad Kopi Parahyangan* menghadirkan institusi penghukuman. Aparatus Represif Negara lain yang berbentuk hukuman mati juga muncul pada novel ini:

Bulu kuduk Karim berdiri saat melewati lapangan depan gedung senjata, di sanalah tempat penjahat dieksekusi mati. Roh-roh paling bengis tentulah mereka yang mati kena hukuman penyulaan. Hukuman paling ditakuti di tanah ini. Besi runcing ditusukkan ke bagian belakang hingga menembus di antara leher dan kedua bahu. Tak ada organ vital yang tertusuk. Terpidana dibiarkan mati perlahan-lahan dalam keadaan haus, lapar, dan kesakitan (Rezeki, 2020: 70).

Melalui reaksi Karim pada adegan di atas, diketahui bahwa tempat tersebut menimbulkan teror dan ketakutan. Dapat disimpulkan bahwa tempat eksekusi mati tersebut merupakan Aparatus Represif Negara.

Hukuman mati pada masa ini biasanya dipertontonkan. Atas perintah Daendles, pada tahun 1808, hukuman mati berlaku di seluruh Hindia Belanda. Narapidana hukuman mati biasanya dieksekusi sambil dipertontonkan kepada publik. Ia biasanya dilaksanakan di Balai Kota pada hari-hari tertentu setiap bulannya (Tim Institute for Criminal Justice Reform, 2017:47-55). Hukuman mati yang dipertontonkan pada dasarnya untuk menunjukkan dan memaksakan kebenaran dan kekuasaan. Hukuman yang dipertontokan berupaya menyadarkan masyarakat bahwa tindakan serupa bakal berakibat serupa. Hal ini adalah ajang penguasa unjuk kekuasaannya. Pada lambatnya proses eksekusi dan penyiksaan, setiap tangisan dan penderitaan dianggap mengungkapkan kebenaran tertentu (Foucault, 1995: 43-49).

Kesimpulan

Novel ini menampilkan produk-produk Aparatus Ideologi Negara. Aparatus ini bisa dilihat kesesuaiannya dengan konteks kesejarahannya. Aparatus Ideologi Negara yang tampil berwujud

politik, keluarga, budaya, hukum, komunikasi, dan pendidikan. Ia muncul terutama untuk memengaruhi jalan cerita *Babad Kopi Parahyangan*. Sedangkan wujud Aparatus Represif Negara yang dihadirkan dalam novel ini adalah pemerintahan, polisi kebun, Pasukan Jayengsekar, penjara, dan hukuman mati. Aparatus Represif Negara dalam novel ini berkesinambungan secara estetis dengan cerita ini. Ia hadir untuk memengaruhi kisah dalam roman ini, yang tentunya juga berkesesuaian dengan konteks kesejarahannya.

Daftar Pustaka

- Althusser, L. (2014). *Ideology and Ideological State Apparatuses*. London: Verso.
- Anggraini, A. D. (2006). "Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di Jawa Pada Tahun 1830-1870". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Bloembergen, M., & Klinkers, E. (2014). "Dutch Colonial Police". In G. Bruinsma, & D. Weisburd (Eds.), *Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice* (pp. 1201-1211). New York: Springer New York.
- Bourdieu, P., & Passeron, J. C. (1990). *Reproduction in Education, Society, and Culture*. London: Sage Publications.
- Breman, J. (2014). *Keuntungan Kolonial Dari Kerja Paksa: Sistem Priangan Dari Tanam Kopi di Jawa, 1720-1870*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Carey, P. (2008). *The Power of Prophecy: Prince Dipanagara and the end of an old order in Java, 1785-1855*. Leiden: KITLV Press.
- Dumenil, G., & Foley, D. (2015). *Analisa Marx Atas Produksi Kapitalis*. IndoPROGRESS.
- Foucault, M. (1995). *Discipline and Punish: the Birth of the Prison*. New York: Vintage Books.
- Goor, J. V. (1986). *Trading Companies in Asia, 1600-1830*. Utrecht: Het Uitgevers.
- Marx, K., & Engels, F. (2009). *Manifesto Partai Komunis*. Rowland Literature.
- Poesponegoro, M., & Notosusanto, N. (2019). *Sejarah Nasional Indonesia IV: Kemunculan Penjajahan di Indonesia (±1700-1900)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rezeki, E. S. (2020). *Babad Kopi Parahyangan*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
- Ricklefs, M. C. (2007). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi.
- Rossum, M. v. (2018). "The Carceral Colony: Colonial Exploitation, Coercion, and Control in the Dutch East Indies, 1810s-1940s". *International Review of Social History*, 63(26), 65-88.
- Said, E. (1978). *Orientalisme*. New York: Pantheon Books.
- Swingewood, A. (1972). *The Sociology of Literature*. New York: Schocken Books.
- Tim Institute for Criminal Justice Reform. (2017). *Politik Kebijakan Hukuman di Indonesia dari Masa ke Masa*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.